

CURRICULUM INNOVATION “INDEPENDENT LEARNING” IN THE ERA OF SOCIETY 5.0

INOVASI KURIKULUM “MERDEKA BELAJAR” DI ERA SOCIETY 5.0

Mira Marisa

¹² Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, FITK, UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

^aEmail: miramalisa97@gmail.com

(*) + 62 821-7703-9647

How to Cite: Marisa (2021). Title of article. Santhet, 5(1), 66-78

doi: 10.36526/js.v3i2.

Received : 12-3-2021
 Revised : 15-03-2021
 Accepted : 28-4-2021
Keywords:
*Independent Learning
 Curriculum;
 Society 5.0*

Abstract

Policies are made on the basis of issues and considerations related to the expected goals. Technological developments will always affect human life so that they have an impact on how people think and behave in their lives.. The education sector, from time to time has developed into a polemic for individuals if a significant policy is not implemented. The data collection method from this article is carried out by using the literature study technique, in the form of reference sources from books, journals and so on. Therefore, Indonesia is currently making this breakthrough by changing the curriculum policy to be "free to learn" which is intended so that the policy does not burden education both for educators and students. The policy of independent learning is intended to make the learning process more enjoyable and less boring. The independent learning curriculum is also expected to be able produce output from education who have high morals. That the independent learning curriculum strives for the role of technology, which is a human need today, to be integrated with another. So, in the era of society 5.0 problems of social life experienced by each individual will be combined with the role of technology which is used as a tool in solving problems of social life.

PENDAHULUAN

Optimalisasi kebergunaan pendidikan merupakan salah satu dari sebuah pencapaian kebahagiaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pendidikan dengan kualitas yang tinggi mencerminkan adanya sekumpulan individu yang maju, damai serta terarah ke dalam sifat-sifat yang konstruktif. Pendidikan juga dijadikan sebagai roda penggerak kebudayaan dan kebiasaan didalam makna Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung pada bagian alinea keempat dengan makna bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa

sebagai bentuk beban yang kuat dalam menggapai kebijakan bagi pemerintah Indonesia (Arifin, 2011).

Pendidikan di Indonesia kembali bangkit setelah kemerdekaan dicapai. Pada zaman orde lama, orde baru sampai saat ini kehidupan bangsa selalu melakukan penggerakan dalam mencerdaskan kehidupan (Kebudayaan, 1985). Kebijakan terus dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan yakni menyeimbangkan pendidikan di seluruh Indonesia dengan memperbaiki beban moral yang terkandung dalam

pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (Fukuyama, 2018). Namun demikian, yang terjadi bahwa pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya.

Indonesia dalam perjalanan setiap zamannya selalu mengarah pada sebuah kemajuan. Hal ini terlihat sebagaimana pemerintah terus melakukan berbagai upaya kebijakan. Terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah Indonesia memberikan program wajib belajar serta pembinaan berupa beasiswa kepada masyarakat kecil yang kurang mampu. Selain itu, bahwa dalam meningkatkan kualitas pendidikan maka beberapa hal yang menjadi program kebijakan tersebut telah diupayakan untuk terealisasi dengan baik.

Akan tetapi, ada sebuah pertanyaan besar dalam kebijakan tersebut. Hal ini terkait bagaimana dan kemana sebenarnya arah pendidikan Indonesia saat ini. Tidak hanya itu, yang menjadi pertanyaan besar juga kenapa sistem pendidikan di Indonesia ini selalu terjadi perubahan-perubahan, apa sebenarnya letak dari urgensi perubahan pendidikan Indonesia. Dalam hal ini bahwa sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia tidak perlu sebegitu dinamisnya berubah. Namun demikian, para individu yang terlibatlah harus diberi sistem pengaktualisasian diri yang berkualitas.

Beberapa hal erat kaitannya dengan sistem yang telah ditentukan maka hal tersebut harus mampu diaplikasikan dengan benar. Sistem yang ditentukan ketetapanannya akan terimplementasi dengan baik apabila ada bentuk ketegasan didalamnya. Oleh sebab itu, revolusi mental harus dimiliki bagi setiap

individu untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, kemana sebenarnya konsep dari pendidikan Indonesia. Terlihat bahwa kondisi yang saat ini terjadi banyak sekali disiplin ilmu yang dipelajari dalam lembaga pendidikan. Akan tetapi, jika diamati bahwa arah pendidikan Indonesia tidak terfokus dalam satu tujuan melainkan bercabang-cabang yang menyebabkan bentuk pengaktualisasian dari disiplin ilmu berdampak pada kesejangan. Hal ini menjadi sebuah alasan yang fundamental bahwa upaya yang dilakukan dalam mewujudkan beban moral pemerintah sampai saat ini masih dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

Saat ini, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengakibatkan adanya pembicaraan ruang publik, hal ini terkait dengan kurikulum “merdeka belajar”. Hal yang sedemikian hangat dijadikan perbincangan, ternyata program ini diwujudkan dengan adanya kebijakan bahwa Ujian Nasional sejak tahun 2021 dihapuskan dan diganti dengan adanya sistem penilaian (Asesmen Kompetensi Minimum) serta survei karakteristik (Wibawa, 2019).

Oleh sebab itu, yang terjadi Rocky Gerung sebagai salah satu observer menyebutkan “bahwa sebenarnya ijazah itu diberikan sebagai tanda bagi seseorang pernah sekolah bukan untuk membuktikan seseorang itu pernah dalam keadaan berpikir”. Dengan demikian, pernyataan dari seorang observer tersebut diargumentasikan dengan apa yang telah diupayakan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini. Hal ini terkait sebagaimana peningkatan mutu pendidikan, apa yang akan dan harus dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan tujuan dapat menghadirkan manusia yang memiliki kreatifitas tinggi dalam mengaktualisasikan ilmu yang dimiliki serta menghilangkan sifat individualisme sehingga menyebabkan individu tersebut hanya mampu berpikir monoton.

Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan tujuan utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan pendidikan saat ini, yakni terfokus pada tiga peningkatan indikator terkait. *Pertama*, numerasi yang dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kemampuan penguasaan terkait dengan angka-angka. *Kedua*, literasi yakni terkait dengan kemampuan individu dalam hal menganalisa bacaan serta memahami bagaimana karakter dalam melakukan pembejaran terkait dengan ke-Bhinekaan dan sebagainya.

Konsep dari “Merdeka Belajar” bahwa sejatinya hal ini belum menentukan sebuah arah dari tujuan pendidikan di negara kita. Akan tetapi, konsep dari merdeka belajar membawa arah untuk mampu berkontribusi dengan baik dalam menuntut peningkatan ekonomi bagi peserta didik sehingga dapat belajar secara bebas. Sekali lagi, bahwa pendidikan di negara kita tidak menuntut untuk apa, melainkan terbagi dalam beberapa bagian yang mengakibatkan masalah sosial di Indonesia belum dapat selesai dengan seutuhnya. Hal ini dikarenakan pendidikan dipersiapkan untuk mampu mengantisipasi

berbagai macam masalah sosial yang tengah berada dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu dilakukan yakni mengenai perlunya memahami kondisi psikologis pendidikan dinegara kita, yang mana bahwa kondisi psikologis setiap wilayah itu berbeda-beda tidak dapat sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk itu, bahwa sebelum dilakukannya perubahan sistem pendidikan maka harus dilakukan adanya pendekatan psikologis dan budaya pendidikan. Tidak hanya itu, bahwa sebagaimana yang dikatakan sebelumnya revolusi mental bagi tenaga pendidik juga harus mampu memiliki tujuan pendidikan tersebut secara optimal.

Di Indonesia, kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu meningkatkan perubahan dengan tidak perlu melakukan perubahan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan sistem yang dibuat tujuannya adalah baik dan secara umum pasti kebijakan sistem yang ditentukan merupakan cita-cita dari konsep menuju kebaikan serta kebahagiaan. Individu dijadikan sebagai pelaku kebijakan. Ketika pelaku kebijakan telah bekerja secara optimal untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan, namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka kebijakan tersebut perlu dirubah (**Drake, 2013**).

Pemahaman yang terjadi bahwa konsep dari merdeka belajar adalah kemerdekaan dalam berpikir. Terkait pemahaman seperti ini esensi dari kemerdekaan berpikir harus terlebih dahulu dimiliki oleh para pendidik. Tanpa diawali ujung tombak pelaku utama, yakni seorang

pendidik maka tidak mungkin terjadi pada para pelaku lainnya, yaitu peserta didik. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Nadiem dengan mencontohkan banyak kritik dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan, seperti kebijakan dengan mengembalikan penilaian Ujian Nasional ke sekolah masing-masing. Oleh karena itu, terjadi berbagai kritik dalam menyebutkan bahwa banyak kepala sekolah dan pendidik yang tidak siap dan belum memiliki kompetensi dalam menciptakan penilaian individu.

Dengan demikian, perlu adanya kemampuan dalam proses menerjemahkan berbagai kompetensi dasar dari kurikulum sehingga hal ini mempengaruhi adanya pembelajaran yang terjadi. Seorang pendidik tanpa melalui adanya proses interpretasi, refleksi serta pemikiran secara mandiri dan bentuk dari bagaimana menilai kompetensinya serta menerjemahkan kompetensi dasar yang menjadi suatu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik. Mendikbud menyebutkan bahwa Pembelajaran akan terjadi ketika seorang pendidik mampu menerjemahkan kurikulum dengan baik. Dengan demikian, bahwa paradigma merdeka belajar merupakan sebuah upaya untuk menghormati perubahan yang harus terjadi bagi pembelajaran disekolah saat ini. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji lebih lanjut terkait kurikulum merdeka belajar.

Metode Penelitian

Sebagaimana uraian terkait dengan artikel tersebut. Penulis melakukan sebuah penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode *library research* yakni studi kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil bacaan

dan tulisan dari beberapa referensi seperti buku, jurnal dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembahasan

1. Pengembangan Kurikulum Indonesia

Implementasi dari kurikulum merupakan bagian dari persiapan yang akan dihadapi dalam tantangan zaman di masa yang akan datang. Masa yang akan datang dunia pekerjaan akan dipenuhi oleh para pelaku pendidikan yang saat ini sedang belajar meraih cita-citanya, mereka adalah para peserta didik (Indar, 1995). Oleh sebab itu, kurikulum merupakan cerminan dari pembentukan pendidikan karakter yang berkontribusi penuh terkait masa depan bangsa.

Pola kehidupan terjadi semakin dinamis seperti tidak ada batasannya, hal ini dibuktikan dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang pesat dan memiliki peran penuh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jika sedikit saja tertinggal maka pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang secara dinamis selalu terjadi pembaharuan. Keunggulan pendidikan suatu bangsa sebenarnya tidak terletak pada kurikulumnya melainkan bagaimana kebijakan kurikulum yang mana hal tersebut harus sejalan dan satu arah dalam rencana pembangunan nasional secara makro.

Dengan demikian, bahwa apapun yang menjadi kebijakannya kurikulum harus selaras dengan tujuan yang memiliki pengaruh pada pembangunan bangsa, hal ini dikarenakan pendidikan bukan dijadikan sebagai entitas yang terjadi atas dasar berdiri sendiri, melainkan pendidikan merupakan sebuah pilar utama bagi pembangunan, dan erat kaitannya dengan sektor-sektor lain

(Koentjaraningrat, 1985). Diantaranya adalah kesejahteraan ekonomi, dinamika politik dan sosial-budaya yang menjadi stabilitas keamanan untuk negara dan begitu besar pengaruhnya terhadap bagaimana arah perkembangan pendidikan. Untuk itu, maka diperlukan adanya kebijakan kurikulum yang memiliki sifat adaptif dan fleksibel dalam menghadapi situasi dan kondisi terhadap keadaan yang seharusnya seperti apa perkembangan dan pendekatan untuk dilakukan agar mendapat pola kebijakan yang tepat.

Berkaitan dengan kebijakan kurikulum yang terus dilakukan inovasi agar tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka seperti apa yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa secara umum tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait dengan apa yang telah dituangkan tersebut, maka hal ini memiliki makna dalam pengembangan kehidupan individu yang intelektual dengan istilah “*intelligent living*”

yakni memiliki maksud agar dalam kehidupannya individu memiliki kualitas kehidupan yang manusiawi.

Kemudian, dari pada itu bahwa tujuan pendidikan umum secara nasional mempunyai relevansi yang terkait dengan pembangunan nasional hal ini tertulis sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas. Diantaranya beberapa relevansi yang terkait, yaitu:

- a. Kriteria akademik, dimaksudkan untuk kurikulum dijadikan sebagai standar pendidikan nasional.
- b. Kriteria religi-moral, hal ini terkait sebagaimana pembentukan karakteristik untuk memiliki ketaqwaan serta memiliki moral tinggi.
- c. Kriteria ketenagakerjaan, hal ini dimaksudkan agar *output* yang dihasilkan memiliki kompeten dibidang pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah didapat individu pada proses pendidikan sebelumnya (Suparman, 2014).

Tabel 1. Perkembangan Kurikulum Periode Politik dan Undang-Undang

Tahun	Periode Politik	Kurikulum	Landasan Pendidikan
1945-1949	Revolusi Fisik	Rencana Pelajaran 1947	
1949-1950	RIS		UU Pendidikan 1950
1950-1959	Demokrasi Parlementer	Rencana Pelajaran Terurai 1952	UU Pendidikan 1954
1959-1966	Orde Lama	Rencana Pendidikan 1964	Perpres No. 19 Tahun 1965 mengenai pokok-pokok Sisdiknas Pancasila
1966-1968	Orde Baru	Kurikulum 1968	
		Kurikulum 1975	
		Kurikulum	

		1984		
			Kurikulum	UU No. 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional
		1994		
1998- Sekarang	Era Reformasi		Kurikulum	
		1994-Suplemen 1999		
			Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004	UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional
			Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	PP. No. 19 Tahun 2005
			Kurikulum Nasional 2013	PP. No 32 Tahun 2013
			Kurikulum Merdeka Belajar	
		2019		

Sebagaimana yang terurai dalam tabel diatas bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu:

- a. Perubahan Politik, sebagaimana yang terjadi bahwa perkembangan kurikulum juga berkaitan dengan adanya pergantian kabinet. Pada kurikulum rencana pelajaran 1947 bahwa di era awal kemerdekaan dipengaruhi adanya antusiasme semangat yang begitu besar terkait dengan model kolonial Belanda. Sedangkan, pada kurikulum 1964 bahwa hal ini diperkuat dengan adanya doktrin-doktrin politik terkait dengan pemerintahan pada masa orde lama yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Namun demikian, yang terjadi adalah hal ini berlawanan dengan kurikulum 1968 yang baru muncul dan mengakibatkan munculnya pemikiran yang bertekad untuk memperbaiki situasi dan kondisi negara setelah terjadinya gerakan 30 SPKI.
- b. Perkembangan Masyarakat terkait kebutuhan pembangunan nasional, sebagaimana yang terjadi bahwa kurikulum dalam perkembangannya selalu terjadi revisi hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang dalam

perencanaannya merespon untuk zaman akan terus melakukan inovasi-inovasi terbaru. Masa Orde Baru tentunya kurikulum mengalami penyempurnaan secara berkala. Sehingga dimasa itu tidak begitu besar revisi kurikulum yang diperbaharui, hal ini disebabkan karena penyusunannya lebih dari bagaimana penyempurnaan sturktur yang ada. Hal ini juga ditujukan untuk sebagaimana perencanaan pembangunan nasional tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN (Ety, 2002).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum yang terjadi relatif lebih tertib. Hal ini terjadi dikarenakan, adanya situasi politik cenderung stabil pada masa kepemimpinan yang begitu otoriter yakni pada masa Presiden Soeharto. Kemudian, terkait kurikulum 1975 bahwa kurikulum berorientasi terhadap tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan, hal ini terkait adanya pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Selanjutnya, pada kurikulum 1984 bahwa kurikulum lebih ditekankan secara esensial serta kurikulum 1994 tujuan belajar dimaksudkan lebih kepada penjabaran

program kerja guru. Selain itu, bahwa terdapat empat elemen yang berkaitan dengan kegiatan instruksional. *Pertama*, mengidentifikasi terkait makna dan tujuan dari pendidikan. *Kedua*, memilih pengalaman terkait proses pembelajaran yang relevan sesuai dengan harapan pencapaian dari tujuan pendidikan. *Ketiga*, mengelola proses pembelajaran secara sistematis dengan melakukan inovasi yang baru. *Keempat*, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian, bahwa pada kenyataannya timbul pemikiran bagi para pelaku pendidikan khususnya pendidik, yang mana kurikulum selalu berganti-ganti hal ini dipengaruhi adanya tuntutan politik yang memiliki kontribusi dalam mengembangkan kurikulum tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, kurikulum yang saat ini dirasakan selalu dikaitkan dengan bagaimana pemimpin yang menguasai penuh situasi politik. Namun demikian, bukan berarti bahwa pemerintah dengan sebesarnya menetapkan kebijakan. Hal ini dikarenakan kurikulum dijadikan sebagai politik pendidikan. dalam sebuah negara hukum, bahwa terkait dengan apa yang menjadi kebijakan kurikulum dikaitkan sebagaimana bagian dari konstitusi. Maka dari itu, bahwa inovasi kurikulum perlu memperhatikan sebagaimana konstitusi yang berlaku terkait perundang-undangan di Indonesia.

2. Definisi dan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka belajar merupakan bagian dari kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

Menurut Nadiem, bahwa kebijakan kurikulum terkait merdeka belajar harus dilakukan penerobosan awal terlebih dahulu kepada para pendidik sebelum hal tersebut disampaikan atau diterapkan kepada peserta didik. Selain itu, Nadiem juga mengatakan terkait kompetensi guru yang levelnya berada di level apapun itu, tanpa adanya proses penerjemahan dari kompetensi dasar yang ada serta erat kaitannya dengan kurikulum maka pembelajaran tidak akan terjadi.

Dimasa mendatang, bahwa sistem pembelajaran juga akan memiliki nuansa yang berbeda yakni tadinya pembelajaran selalu menggunakan ruang kelas, maka suasana berbeda seperti belajar diluar ruang kelas akan dicoba untuk terealisasi pada kurikulum merdeka belajar ini. Selain itu, penekanan proses pembelajaran lebih ditekankan pada pembentukan karakter siswa, hal ini diterapkan dengan cara pendidik dan peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik melalui kegiatan belajar mengajar dengan metode diskusi yang tidak membuat psikologis peserta didik merasa takut. Walaupun demikian, penerapan pembelajaran yang seperti ini tetap tidak melupakan bagaimana capaian kompetensi yang harusnya didapat. Oleh sebab itu, bahwa kurikulum merdeka belajar ini berkaitan dengan bagaimana seorang pendidik mampu menyampaikan materi pelajaran dengan mengaitkan pada pembentukan karakter peserta didik.

Selain itu, terkait dengan penerapan sistem pembelajaran yang menekankan pada pembentukan karakter siswa maka bentuk penilaian yang terjadi juga tidak hanya sebatas

menentukan dalam sebuah perankingan, yang mana kebijakan kurikulum merdeka belajar ini lebih menekankan bagaimana bakat dan kecerdasan dari setiap peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian,

sistem kebijakan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar ini diharapkan dapat membentuk para peserta didik yang siap kerja serta memiliki kompeten dengan moral tinggi dan dapat berguna bagi lingkungan masyarakat.

Tabel 2. Terobosan Merdeka Belajar

Konsep Belajar Merdeka	Moto Merdeka Belajar
<p>USBN tahun 2020 dikembalikan pada pihak sekolah.</p> <p>Di tahun 2021, Nadiem Makarim menyebutkan bahwa UN dihapuskan dan dirubah menjadi sistem baru, yakni dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter.</p> <p>Menjadikan peserta didik memiliki kompeten serta cerdas dalam meningkatkan SDM bangsa dan memiliki moral tinggi.</p>	<p>“Merdeka Belajar Guru Penggerak”</p>

Dari tabel diatas, bahwa dapat dikatakan Nadiem Makarim terdorong untuk melakukan inovasi dalam menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa membebani pendidik ataupun peserta didik dengan harus memiliki ketercapaian tinggi berupa skor atau kriteria ketuntasan minimal. Oleh karena itu, terkait kebijakan baru hal ini dipaparkan oleh Nadiem Makarim kepada para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta, 11 Desember 2019. Dengan demikian, Nadiem memaparkan empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yakni:

1. Ujian Nasional (UN) yang akan diiadakan dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Dalam hal ini bahwa kemampuan menalar dalam literasi dan numerik yang didasari dengan praktik terbaik tes PISA. Hal ini tentu berbeda dengan UN yang dijadwalkan akan terlaksana pada akhir

jenjang pendidikan. Namun, Asesmen dilaksanakan di tingkat kelas IV, VIII, dan XI. Dari sistem penilaian yang telah dilakukan inovasi ini, tentu memiliki harapan bahwa pada hasilnya dapat memberi masukan bagi sekolah dalam memperbaiki proses pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.

2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) terkait kebijakan ini bahwa USBN diserahkan seutuhnya pada sekolah masing-masing. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasan dalam menentukan penilaian, baik itu melalui proses portofolio, karya tulis serta bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarim mengatakan, RPP cukup dibuat dalam satu halaman tanpa harus ratusan halaman. Tidak hanya itu, penyederhanaan administrasi diharapkan para pendidik mampu

mengalihkan kegiatan belajar dengan capaian meningkatkan kompetensi.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni terkait kebijakan PPDB lebih ditekankan dengan penerapan sistem zonasi, namun tidak termasuk wilayah 3T. Dengan demikian, bahwa peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi lebih memiliki kesempatan yang banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis dalam menentukan daerah zonasi.

Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa sebuah alasan. Pasalnya, penelitian yang terjadi yakni terkait dengan *Programme For International Student Assesment* (PISA) di tahun 2019 bahwa hal tersebut menunjukkan adanya hasil penilaian bagi para peserta didik yang menempati posisi keenam dari bawah yaitu 74 dari 79 negara, terkait bidang matematika dan literasi (Hasim, 2020).

Dengan demikian, bahwa menyikapi hal itu Nadiem membuat gebrakan penilaian dalam mengukur kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi survei karakter. Oleh karena itu, bahwa literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, namun juga kemampuan dalam menganalisis bacaan. Sedangkan, dalam kemampuan numerasi yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa untuk mampu menerapkan sebagaimana konsep numerik dalam kehidupan nyata.

B. Hasil Pembahasan

1. Inovasi Baru Terkait Fenomena Merdeka Belajar

Sebagaimana konsep dalam merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan “Nadiem Makarim” bahwa hal tersebut bukanlah topik baru yang harus diperdebatkan. Hal ini sudah sekian lama dicanangkan oleh para penggiat pendidikan. Berkaitan dengan itu, bahwa terkait konsep merdeka belajar telah mengadakan kegiatan diskusi dengan tema merdeka belajar, kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari ranah publik khususnya para penggiat pendidikan, karena akan menjadi sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan.

Merdeka belajar adalah inovasi dari program unggulan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Maksud dari merdeka belajar ini adalah terkait bagaimana kebijakan yang dibuat strategis dan termuat untuk kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Sistem Zonasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun demikian, bahwa konsep dari merdeka belajar ini bukan hanya proses pembelajaran yang dilakukan diruang kelas yang selalu menjadi bagian pertanyaan dari para pendidik. Akan tetapi, merdeka belajar memiliki cita-cita yang luhur dalam mewujudkan harapan bangsa tanpa melampaui batas dunia (Putra, 2019).

Dengan demikian, artinya ketika sebagaimana yang diuraikan tersebut terjadi, maka pendidik juga memiliki kemerdekaan dalam mengajar. Walaupun demikian, bahwa konsep awal dari merdeka belajar ini adalah sebuah tindakan dengan karakteristik

kebebasan namun tetap mengekspresikan belajar pada batas dan kritikan yang ada, tanpa harus melunturkan sebagaimana cita-cita luhur dan juga moral bagi pelaku pendidikan. Yang terjadi secara dewasa ini adalah bahwa banyak yang terjebak dalam memaknai cara dan tujuan dari merdeka belajar, sehingga hal ini berpengaruh pada sistem administrasi berkenaan dengan ketentuan birokrasi, akreditasi yang semuanya hanya bagian dari cara menjadikan tujuan tersebut sebagai prioritas.

Konsep dari merdeka belajar dipahami mudah untuk diucapkan namun sulit untuk diimplementasikan. Konsep merdeka belajar berkaitan dengan komitmen, kemandirian dan kemampuan untuk mewujudkannya, sehingga dari ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa terlepas. Komitmen dalam belajar merupakan bagian awal dari cita-cita serta tujuan yang telah dituangkan dalam undang-undang pendidikan nasional. Mandiri dalam merdeka belajar juga dijadikan sebagai sebuah landasan dalam mencapai tujuan, akan tetapi hal ini juga sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, bahwa banyak yang terjebak dalam memanipulasi ketentuan serta jabatan yang mengakibatkan kesulitan dalam proses belajar merdeka. Hal ini terhenti diakibatkan banyak masukan serta beberapa tempat konsultasi, sehingga kemampuan dalam mewujudkannya menjadi bagian dari kendala yang begitu besar untuk melakukan inovasi baru dalam pendidikan.

Selain itu, ada pernyataan yang mengatakan bahwa seorang pendidik tidak harus belajar kepada yang ahli dalam pakar

pendidikan. Pendidik juga tidak perlu menjadi seorang figur yang sempurna dengan mengharuskan diri serba bisa. Pendidik yang efektif adalah pendidik yang mampu belajar dari sebuah kegagalan baik yang didapat oleh diri sendiri ataupun para rekan sejawat. Sehingga dari ranah kegagalan tersebut pendidik mampu belajar dengan lebih baik dan mampu mempraktikkan apa yang harus dipelajari. Pendidik yang berani belajar bukan dimaksudkan untuk dapat mengetahui, namun bisa memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain.

Dari pada itu, bahwa konsep merdeka belajar dimaknai untuk tidak memaksa target pencapaian, namun belajar itu memerlukan waktu dalam inovasi barunya. Peserta didik membutuhkan sesuatu yang terlihat berbeda dari sebelumnya, hal ini didapat dari sebagaimana peran pendidik. Berkaitan dengan potensi para peserta didik yang diperoleh tidak hanya dari proses pembelajaran diruang kelas, namun juga bisa didapat dari lingkungan belajar lainnya. Sehingga kompetensi yang diperuntukkan bagi peserta didik tidak bersifat individualisme melainkan tumbuh bersama lingkungan belajar sekitarnya.

Sebagaimana manusia yang merdeka bahwa semua memiliki keberagaman, hanya saja setiap individu memiliki perannya masing-masing. Merdeka belajar ataupun belajar merdeka terkait istilah tersebut tidak ada perbedaan, hal ini dikarenakan keduanya sama hanya saja memiliki perbedaan antara metode dan sistem. Merdeka belajar merupakan salah satu program yang dimaksudkan untuk menciptakan suasana

belajar yang bahagia baik bagi peserta didik ataupun pendidik dengan tujuan agar para pendidik dan peserta didik serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang belajar yang menyenangkan, karena prinsip dari merdeka belajar adalah menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa adanya beban yang berat diakibatkan tuntutan pencapaian.

Ujian Nasional yang selama ini dijadikan sebagai pintu gerbang bagi para peserta didik di Tanah Air dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terkait hal itu Ujian Nasional dicanangkan pada tahun 2021 akan ditiadakan dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Hal ini dilakukan karena kebijakan terkait UN dianggap kurang tepat karena hal ini dianggap berdampak pada arah kognitif siswa yang dituntut untuk menghafal bukan untuk memahami. Oleh karena itu, bahwa adanya kebijakan UN hanya mementingkan capaian nilai akademis saja sedangkan hal tersebut bertentangan dengan sebagaimana prinsip pendidikan yang juga memerlukan perhatian terkait sikap psikologis peserta didik. Persatuan Guru Republik Indonesia juga pernah melakukan survei yang mana kegiatan UN tersebut juga dikatakan tidak memiliki keefektifan yang hasilnya 70 % masyarakat dan guru setuju UN ditiadakan. Dan ternyata kebijakan yang tadinya dicanangkan pada tahun 2021 untuk bisa diimplementasikan, sebelum itu tahun 2020 UN telah ditiadakan diakibatkan bahwa dunia sedang menghadapi persoalan besar terkait pembelajaran yang semula bisa terjadi secara tatap muka, saat ini beralih menjadi pembelajaran daring.

Terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi sebagian besar negara didunia, bahwa kebijakan mengenai kurikulum merdeka belajar ini telah mendapat lampu hijau dari Komisi DPR RI. Walaupun demikian, hal ini juga dikhawatirkan para pendidik belum siap dengan sistem asesmen yang baru. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan yakni masih dijumpai beberapa sekolah belum siap untuk diberi kebebasan dalam membuat sistem penilaian sendiri, hal ini disebabkan adanya fasilitas dan kualitas guru yang masih minim.

Beberapa opini pun bermunculan dari beberapa kalangan para akademisi. Sebagian mempertanyakan standar apa yang diterapkan secara nasional jika UN memang benar-benar ditiadakan. Namun demikian, bahwa hal tersebut menunjukkan lebih kepada peningkatan kompetensi pendidik secara merata, karena pengaruh berhasil tidaknya program merdeka belajar ini ditentukan oleh kompetensi guru yang kondisinya saat ini belum merata seperti apa yang diharapkan.

2. Merdeka Belajar Di Era Masyarakat 5.0

Inovasi yang begitu cepat membawa arus kemajuan yang begitu pesat dalam dunia teknologi yang berdampak pada kehidupan sosial. Ruang maya dan fisik tidak ada lagi batas, sehingga gaya hidup dari masyarakat akan terjadi transformasi yang begitu signifikan. Peran teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam berinteraksi dan melakukan transaksi.

Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 merupakan konsep dari bagian untuk mengintegrasikan, menyeimbangkan antara perkembangan kemajuan teknologi dan

permasalahan sosial yang memadukan dunia maya dan fisik. Selain itu, ada pula yang memaknai *society 5.0* adalah sekumpulan individu yang memanfaatkan teknologi di era evolusi industri 4.0 untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. *Internet of Think* dan *Artificial Intelligence* memiliki peran penuh dalam menghadapi era *society 5.0* dengan tujuan sekumpulan individu atau masyarakat dapat menikmati kehidupan yang memiliki kualitas tinggi (Houtman, 2020).

Oleh karena itu, banyaknya populasi penduduk yang juga semakin menurun setiap tahunnya, hal ini berpengaruh pada kurangnya masyarakat di usia produktif. Negara lain, seperti Jepang mengamati akan adanya masalah dalam berbagai hal yang mengakibatkan kurangnya tenaga kerja berefek pada penurunan produktivitas dari individu, penduduk yang jauh dari kota akan kesulitan dalam mobilitas serta transportasi, pembangunan yang juga akan mengalami penurunan disebabkan kekurangan tenaga kerja yang profesional serta dampak lainnya. Oleh sebab itu, Jepang telah berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial.

Society 5.0 juga merupakan bagian dari Rencana Sains dan Teknologi kelima yang digagas oleh pemerintah Jepang sebagai masyarakat yang memiliki masa depan dalam mewujudkan cita-cita. Inovasi teknologi yang semakin berkembang pesat begitu mempengaruhi dalam mengubah kehidupan sosial individu. Dunia maya dan fisik tidak memiliki batasan lagi, sehingga gaya hidup

serta perilaku dari sekumpulan individu akan terjadi transformasi yang signifikan. Peran teknologi benar-benar telah menjadi kebutuhan hidup individu, yang saat ini juga telah kita rasakan baik dalam hal berkomunikasi, bertransaksi, dan sebagainya. Oleh karena itu, konsep seperti inilah menjadikan bahwa saat ini kita berada di Era Masyarakat 5.0 dengan kebijakan kurikulum merdeka belajar, bahwa keduanya saling terintegrasi.

Kesimpulan

Kebijakan baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yakni dilakukannya terobosan baru dalam membuat kebijakan kurikulum “Merdeka Belajar” yang digagaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan “Nadiem Makarim”. Hal ini telah dicanangkan pada tahun 2019. Namun, pada tahap pengaplikasian yang dilakukan, semuanya belum bisa berjalan dengan baik butuh waktu untuk bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada intinya bahwa, kebijakan merdeka belajar ini terkait dengan empat poin yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Oleh karena itu, bahwa konsep merdeka belajar juga merupakan bagian dari *Society 5.0* dimana pada konsep ini bahwa Masyarakat 5.0 memadukan antara perkembangan kemajuan teknologi dengan permasalahan masyarakat, yakni terbukti dengan bahwa teknologi sudah menjadi bagian dari kebutuhan sosial hidup individu. Oleh sebab itu, kebijakan merdeka belajar yang diharapkan mampu membuat dunia pendidikan tanpa beban, dalam kaitannya

dengan konsep masyarakat 5.0 dengan berbagai permasalahan, untuk menanggulangnya yaitu adanya peran teknologi mempengaruhi penyelesaian masalah kehidupan sosial.

Daftar Pustaka

Arifin, Z. (2011). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Drake, S. M. (2013). *Menciptakan Kurikulum Terintegrasi yang Berbasis Standar*. Jakarta: Indeks.
Etty, S. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming For A new Human-Centered Society. *Journal JEF* , 47-50.
Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Universitas Negeri Gorontalo* , 69-73.
Houtman. (2020). Merdeka Belajar Dalam Masyarakat 5.0. *Jurnal Ilmiah Pendidikan* , 39-45.

Indar, M. D. (1995). *Perencanaan Pendidikan: Strategi dan Implementasinya*. Surabaya: Karya Abditama.
Kebudayaan, D. P. (1985). *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
Putra, P. H. (2019). Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* , 99-110.
Suparman, A. (2014). *Desain Instruktusional Modern: Panduan Para Pengajar dan Inovator Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Wibawa, R. (2019). Peran Pendidikan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Era Society 5.0 Sebagai Penentu Kemajuan Bangsa Indonesia. *Journal Of Equilibrium* , 137-141.